



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kota Banjarmasin Tahun 2024-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
12. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

13. Rencana Aksi Nasional yang selanjutnya disebut RAN, Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional untuk mewujudkan sumber daya pemuda yang berkualitas, maju, dan berdaya saing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai Pedoman dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Kota Banjarmasin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- b. Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
- c. Perencanaan dan Penganggaran.

BAB IV PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Kedudukan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Domain Pendidikan;
 - b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan;
 - c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja;
 - d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan; dan
 - e. Domain Gender dan Diskriminasi.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Kepemudaan.
- (5) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. bagian hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim Koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Tugas dan Fungsi tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk direviu, kemudian menyerahkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali;
- h. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kepemudaan;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

Pasal 9

Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
- b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.
- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi

pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

BAB VI

MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAN Pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 november 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 november 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 112

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 112 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI
 DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024-2026

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 – 2026

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	
PROGRAM SINERGIS ANTAR SEKTOR DALAM HAL PENYADARAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN		Domain Pendidikan : 1. Rata-rata lama sekolah pemuda, 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pemuda 3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	9 Tahun	9 Tahun	9 Tahun	9 Tahun	9 Tahun	KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
			Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luar	4823 orang	4810 orang	4850 orang	5092 orang	5204 orang	KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

		Biasa (SMPLB)/ Sederajat							
	<p>Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan b. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal</p>	Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMP)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ Sederajat	2120 orang	2110 orang	2124 orang	2230 orang	2342 orang		KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
		Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	202 orang	241 orang	516 orang	542 orang	567 orang		KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
	<p>Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah</p>	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	20%	25%	25%	90%	90%		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

		Kabupaten/Kota	(Rakortek)						
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (Rakortek)	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)(Rakortek)	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (Rakortek)	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	0.057%	
			Persentase rumah tangga yang	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	

			menyelenggarakan upacara adat (Rakortek)						
		Sub Kegiatan: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	5 Objek	5 Objek	5 Objek	
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang	

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang memiliki sertifikasi dan menguasai materi pembinaan kesenian	-	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
		Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntunan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
		Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi sejarah kota Banjarmasin yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website perangkat daerah	-	100%	100%	100%	100%	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Persentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota yang dibina		5%	7,5%	10%	15%	
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengerti tentang Sejarah Lokal	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
		Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapat penghargaan gerakan budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	51 Orang	3 Orang	9 Orang	9 Orang	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokasi	1 Lokasi	1Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan							DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		tingkat daerah Kab/Kota							
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat (Indikator dipakai mulai 2023-2026)	720 Orang	750 Orang	750 orang	750 orang	750 orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEBANGSAAN									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	100%	224 Orang	224 Orang	224 Orang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							

PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan dan layanan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana	Jumlah anggota TAGANA yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana alam dan sosial dalam rangka kesiapsiagaan, mitigasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah kabupaten / kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
			Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	15 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
		Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	360 Orang	760 Orang	900 Orang	690 Orang	690 Orang	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
		Kegiatan : Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Pneingkatan Peran							

		Serta Masyarakat dan Lintas Sektor tingkat Kab/Kota							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah anggota SBH yang mendapatkan pembinaan	80 orang	80 orang	100 orang	100 orang	100 orang	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif tingkat Kab/Kota							
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pembinaan PHBS	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	

			Jumlah Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4.914 Rumah Tangga	5.023 Rumah Tangga	5.123 Rumah Tangga	5.241 Rumah Tangga	5.350 Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN
	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja : 1. Pemuda wirausaha dan kesempatan kerja 2. Tingkat pengangguran terbuka pemuda Bentuk Koordinasi : Peningkatan daya saing wirausaha pemuda	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	3%	3.50%	4%	4.50%	5%	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	
		Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	515 Orang	530 Orang	556 Orang	583 Orang	612 Orang		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
		Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mampu menerapkan sistem pemasaran secara online	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
		Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat pengembangan kompetensi	60 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
			Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	-	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang mengikuti Uji Kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	-	100 Peserta	125 Peserta	125 Peserta	130 Peserta	
			Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi	-	100 Peserta	-	-	-	

			Pariwisata						
		Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							
		Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Sub Kegiatan : Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi yang mendapat Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	

		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota							DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)

		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 IKM	830 Lembaga	840 Lembaga	850 Lembaga	850 Lembaga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

			Guna					
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	

		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	-	-	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota/Kabupaten						
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	2.1) Jumlah Sarana Prasarana Rumah Kemasan 2.2) Jumlah IKM Yang Di Fasilitas 2.3) Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	(2.1) 34 Buah (2.2) 132 IKM (2.3) 26.453 Orang	-	-	-	-

**DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN**

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.1.)Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi HALAL. 3.2.)Jumlah IKM yang difasilitasi Sertifikat Sertifikasi dan Standarisasi Produk	3.1) 10 IKM (3.2) 60 IKM	3.1) 10 IKM (3.2) 60 IKM	3.1) 10 IKM (3.2) 60 IKM	3.1) 10 IKM (3.2) 60 IKM	3.1) 10 IKM (3.2) 60 IKM	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan Industri dan peran serta masyarakat	4.1) Jumlah IKM dan Sentra Industri yang difasilitasi 4.2) Jumlah Rumah Kemasan yang dibangun 4.3) Jumlah IKM yang Difasilitasi Pelatihan Pembinaan UP2K dan Peserta Forum Diskusi Sasirangan 4.4) Jumlah WUB yang Diciptakan 4.5) Jumlah WUB yang Dikembangkan 4.6) Jumlah Sentra Yang Difasilitasi Industri	(4.1) 98 IKM / 1 Sentra (4.2) 1 unit (4.3).160 IKM (4.4). 45 orang (4.5). 40 orang (4.6).2 sentra	(4.1) 98 IKM / 1 Sentra (4.2) 1 unit (4.3).160 IKM (4.4). 45 orang (4.5). 40 orang (4.6).2 sentra	(4.1) 98 IKM / 1 Sentra (4.2) 1 unit (4.3).160 IKM (4.4). 45 orang (4.5). 40 orang (4.6).2 sentra	(4.1) 98 IKM / 1 Sentra (4.2) 1 unit (4.3).160 IKM (4.4). 45 orang (4.5). 40 orang (4.6).2 sentra	(4.1) 98 IKM / 1 Sentra (4.2) 1 unit (4.3).160 IKM (4.4). 45 orang (4.5). 40 orang (4.6).2 sentra	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Kegiatan: Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian
	Sub Kegiatan: Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota							Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian

		Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (dokumen)	14 Dokumen	16 Dokumen	18 Dokumen	-	-	
		Sub Kegiatan: Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari)	-	-	-	20 Hari	22 Hari	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
		Kegiatan: PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL							Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Bimbingan dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	-	5 Unit	6 Unit	-	-	

		Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko (unit usaha)						
		Sub Kegiatan: Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan	-	-	-	7 Unit	8 Unit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

			Risiko						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
		Kegiatan: PENGAWASAN PENGUNAAN SARANA PERTANIAN							
		Sub Kegiatan: Pengawasan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Sub Kegiatan: Pendampingan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Pergunaan Sarana Pendukung (laporan)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
		Kegiatan: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

		Sub Kegiatan: Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	10 Unit	12 Unit	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi Terhadap Penerapan Cara yang Baik (Laporan)	-	-	15 Unit	15 Unit	17 Unit	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
		Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
		Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Kab/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi						DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
		Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya						DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	140 Usaha Mikro	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	240 Usaha Mikro	300 Usaha Mikro	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil						DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta, Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	35520 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja						DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	48 Orang	64 Orang	80 Orang	96 Orang	112 Orang	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
		Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal						DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
		Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	24 Orang	42 Orang	64 Orang	64 Orang	64 Orang	

		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal						
		Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	-	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	
		Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	515 Orang	530 Orang	545 Orang	560 Orang	575 Orang	
		Domain Kesehatan dan Kesejahteraan : 1. Angka Kesakitan Pemuda 2. Pemuda korban kejahatan 3. Pemuda Merokok 4. Remaja perempuan sedang hamil	Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/ aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir						
		Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan	Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang menjadi korban						

	pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/	tindak kejahatan dalam setahun terakhir						
	acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia b. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial	Persentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir						
	c. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan d. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental e. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan	Persentase remaja perempuan berusia 15 - 18 tahun yang sedang hamil						

	<p>ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agam, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa</p> <p>g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda</p> <p>h. Pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi</p>							
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	<p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	<p>Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, monitoring dan</p>	100%	100%	244 Orang	244 Orang	244 Orang	

		Koordinasi	koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA										
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, monitoring dan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	100%	100%	100%	100%	100%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, monitoring dan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	100%	100%	625 orang	625 orang	625 orang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Kelembagan serta Penanganan Konflik di Daerah						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							DINAS KESEHATAN
		Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9082 Orang	12752 Orang	11347 Orang	11207 Orang	11207 Orang	
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2.	10667 Orang	12 172 Orang	11273 Orang	11134 Orang	11134 Orang	
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	103.598 Orang	103.945 Orang	102.990 Orang	103.932 Orang	103.932 Orang	

		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilakukan skrining sesuai standar (15-59 tahun)	470428 orang	475222 orang	426714 orang	426714 orang	426714 orang	DINAS KESEHATAN
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang berusia 15 tahun ke atas	133929 orang	257775 orang	55863 orang	55863 orang	55863 orang	
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang berusia 15 tahun ke atas	15013 orang	15404 orang	14355 orang	14355 orang	14355 orang	
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita Gangguan Jiwa yang berusia 15 tahun keatas	1358 Orang	1448 Orang	1404 Orang	1516 Orang	1646 Orang	
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Usia 16-30 tahun menderita Tuberkulosis	2.884 Orang	2.841 Orang	2.525 Orang	2.525 Orang	2.525 Orang	
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Usia 16-30 tahun menderita HIV	21263 Orang	21930 Orang	21478 Orang	21478 Orang	21478 Orang	

		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas / Kelurahan mempunyai Kesiapsiagaan terhadap penyakit berpotensi KLB/Wabah	27 puskesmas/ kelurahan	27 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	DINAS KESEHATAN
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Puskesmas / Kelurahan mempunyai Kesiapsiagaan terhadap penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	27 puskesmas/ kelurahan	27 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	28 puskesmas /keluraha n	
			1. Jumlah remaja putri yang dilakukan skrining anemia 2. Jumlah remaja putri yang menderita anemia	1. Rematri di-skrining = 2309 org 2. Rematri anemia = 994 org	1. Rematri di-skrining = 1298 org 2. Rematri anemia = 829 org	1. Rematri di-skrining = 9026 org 2. Rematri anemia = 1910 org	1. Rematri di-skrining = 9026 org 2. Rematri anemia = 1910 org	1. Rematri di-skrining = 9026 org 2. Rematri anemia = 1910 org	
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah anak sekolah / masyarakat/aparat ur yang diperiksa	1.400 Orang	1.400 Orang	1.400 Orang	1.400 Orang	1.400 Orang	

			kebugarannya						
		13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Jumlah TTU yang diawasi 2. Jumlah TPM yang diawasi. 3. Jumlah Pos UKK yang dibina	1.TTU : 145 Orang 2.TPM : 92 Orang 3.POS UKK : 41 Orang	1.TTU : 437 Orang 2.TPM : 1.998 Orang 3.POS UKK : 41 Orang	1.TTU : 437 Orang 2.TPM : 1.998 Orang 3.POS UKK : 41 Orang	1.TTU : 437 Orang 2.TPM : 1.998 Orang 3.POS UKK : 41 Orang	1.TTU : 437 Orang 2.TPM : 1.998 Orang 3.POS UKK : 41 Orang	
		14. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penggerakan masyarakat hidup sehat	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	
		15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1. Jumlah perokok berusia 10-18 tahun 2. Jumlah peserta dilakukan skrining kesehatan jiwa	perokok 2991 orang dan jumlah skrining jiwa 15679 orang	perokok 29177 orang dan jumlah skrining keswa 17345 orang	perokok 2900 Orang dan jumlah skrining keswa 20779 orang	perokok 2900 Orang dan jumlah skrining keswa 20779 orang	perokok 2900 Orang dan jumlah skrining keswa 20779 orang	
		16. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Jumlah penderita kasus DBD 2. Jumlah WUS yang mendapatkan pemeriksaan Iva dan Payudara Klinis	IVA dan Payudara Klinis = 1708 orang	DBD : 88 Kasus , IVA dan Payudara klinis 2992	DBD : 59 Kasus	-	-	

		17.Penyelenggaraa n Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sehat	46.685 Orang	303.750 Orang	710.050 Orang	813.678 Orang	917.305 Orang	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							DINAS KESEHATAN
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagan serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%	625 orang	625 orang	625 orang	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
		Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							DINAS KESEHATAN
		Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah anggota SBH yang mendapatkan pembinaan	80 orang	80 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
		Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pembinaan PHBS	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	10.920 Rumah Tangga	

		Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							DINAS KESEHATAN
			Jumlah Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4.914 Rumah Tangga	5.023 Rumah Tangga	5.123 Rumah Tangga	5.241 Rumah Tangga	5.350 Rumah Tangga	
		Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Jambore Kader	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
			Jumlah Kader Yang mendapat Pembinaan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Sub Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi publik	Persentase Kelompok Pemuda (usia 16-30 tahun) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah yang	100%	100%	100%	100%	100%		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
		Kegiatan : Pengelolaan E/Government di Lingkup Pemerintah Provinsi								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam	Proporsi pemuda (usia 16-30 tahun) dengan keterampilan Teknologi	96%	97%	98%	99%	99%		

		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak							

		Kewenangan Provinsi							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota							
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak untuk melindungi pemuda dari ancaman putus	80 orang	150 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)									

		dalam Daerah Kabupaten/Kota	sekolah dan rendahnya pendapatannya di kemudian hari dan untuk mencegah stunting agar kualitas hidup pemuda dapat menjadi optimal						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
		Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dalam pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32 lembaga	32 lembaga	32 lembaga	32 lembaga	32 lembaga	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap							

		Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan								

		Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota								DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO		
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

		Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Persentase tenaga yang terlatih dan kompeten dalam perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kab/Kota dst.	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan dalam upaya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	

		Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota							
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak untuk melindungi pemuda dari ancaman putus sekolah dan rendahnya pendapatan di kemudian hari dan untuk mencegah stunting agar kualitas hidup pemuda dapat menjadi optimal	80 orang	150 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
		Kegiatan : Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender dan anak yang dicetak	40 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku terpilah anak yang dicetak	20 eksemplar	68 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	
			Jumlah buku terpilah gender yang tersedia	20 eksemplar	68 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota							DINAS SOSIAL

		Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	DINAS SOSIAL
			Jumlah pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan potensinya	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	-	1000 Keluarga	1000 Keluarga	1000 Keluarga	1000 Keluarga	
			Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuannya	-	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial						DINAS SOSIAL	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	-	290 Orang	302 Orang	315 Orang		315 Orang
			Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	-	279 Orang	302 Orang	315 Orang		315 Orang

		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	-	191 Orang	200 Orang	210 Orang	210 Orang	DINAS SOSIAL
			Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang menerima paket sandang	-	191 Orang	200 Orang	210 Orang	210 Orang	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	-	104 Orang	106 Orang	110 Orang	110 Orang	
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ Aids dan Napza di luar							

		panti sosial							
		Sub Kegiatan : Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah (PMKS) lainnya bukan HIV/ Aids dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan HIV/ Aids dan Napza kewenangan	-	200 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	DINAS SOSIAL
			Jumlah peserta bimbingan sosial (PMKS) lainnya HIV/ Aids dan Napza yang memahami materi bimbingan sosial yang diberikan	-	200 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi informasi publik	150 Orang	150 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	

		Monitoring, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi SP4N LAPOR /e-lapor	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, monitoring dan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan, monitoring dan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
		Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan 2. Pelaksanaan Monitoring 3. Pelaksanaan Koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagan serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%	625 orang	625 orang	625 orang	
		Domain Partisipasi dan Kepemimpinan : 1. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial	Persentase pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengikuti						

	<p>kemasyarakatan 2. Partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi 3. Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan</p>	<p>kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir</p>						
	<p>Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan kualitas kesehatan pemuda b. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan c. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan</p>	<p>Persentase pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam 3 bulan terakhir</p>						
		<p>Persentase pemuda berusia 16 -30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/ pendapat dalam rapat</p>						

		tersebut							
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi							
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat (Indikator dipakai mulai 2023-2026)	720 Orang	750 Orang	750 Orang	750 Orang	750 Orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah penyuluhan yang diberikan kepada lembaga dan/atau masyarakat (Indikator dipakai 2022)						

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
		Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							DINAS SOSIAL
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	80 Lembaga	80 Lembaga	80 Lembaga	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	255 Orang	255 Orang	255 Orang	

		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	1 Keluarga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat							DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)

		Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	829 lembaga	830 lembaga	840 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Fasilitasi Pemerintah Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

		dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Anggota Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30.412 orang	30.482 orang	30.517 orang	30.539 orang	30.590 orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Gugus Depan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	

		Kepramukaan							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan daya saing kepemudaan dan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
			Persentase pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang diberdayakan sesuai ketentuan yang berlaku	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah Pemuda Pelopor ke tingkat Provinsi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA									

		Saing Pemuda Pelopor							DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Pemuda Pelopor yang memiliki kapasitas daya saing pemuda ke tingkat Provinsi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah WUB terlatih	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
			Persentase peserta WUB terlatih yang mandiri	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/ kota	225 Orang	225 Orang	775 Orang	775 Orang	775 Orang	
			Jumlah peserta yang meningkat kapasitas daya saingnya pada kegiatan workshop/	225 Orang	225 Orang	500 Orang	250 Orang	250 Orang	

			sosialisasi						
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi penerima penghargaan tingkat Kota Banjarmasin	3 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
			Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang menerima penghargaan sesuai persyaratan tingkat Kota Banjarmasin	3 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Keseluruhan pemuda kader yang mengikuti kegiatan	1090 Orang	1090 Orang	805 Orang	805 Orang	805 Orang	805 Orang
			Jumlah Pemuda Kader yang terbina melalui kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	1090 Orang	1090 Orang	805 Orang	805 Orang	805 Orang	805 Orang

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar	12.5%	22%	30%	36%	41%
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
		Sub Kegiatan : Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang mengikuti seleksi popda	100%	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
			Jumlah Atlet yang terseleksi sesuai	154 Orang	165 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang

**DINAS
KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

			persyaratan							
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta BIMTEK penerapan IPTEK Olahraga prestasi	100%	165 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
			Peserta yang memahami Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga	165 Orang	255 Orang	260 Orang	265 Orang	270 Orang		
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah atlet dan pelatih penerima medali yang menerima bonus pekan olahraga	-	165 Orang	170 Orang	170 Orang	175 Orang		
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti festival dan olahraga rekreasi	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi								

		Kepramukaan							DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Anggota Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30.412 orang	30.482 orang	30.517 orang	30.539 orang	30.590 orang	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Gugus Depan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	900 gugus depan	
		Bentuk Koordinasi : a. Penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan pemuda b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, prikotropika, dan zat adiktif lainnya c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda meliputi seks bebas, human	Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan						

	immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA								
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	100%	100%	572 Orang	572 Orang	572 Orang		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
		Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BAPPEDA LITBANG

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia						
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Domain Gender dan Diskriminasi : 1. Perkawinan usia anak 2. Pemuda perempuan sedang Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi 3. Pemuda perempuan bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 20 - 24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia 18 tahun						

	Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, hiv, dan perdagangan manusia b. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman	Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ Sederajat atau lebih tinggi						
	penurunan kualitas moral dan konflik sosial c. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan d. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental e. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender	Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 30 tahun yang bekerja di sektor formal						

	dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda								
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA									
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Akseptor KB Baru			29545 Akseptor	29545 Akseptor	29545 Akseptor	29545 Akseptor	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
	Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah PIK R/M yang difasilitasi			23 Kelompok	23 Kelompok	23 Kelompok	23 Kelompok	
		Jumlah Peserta Penyuluhan Kesehatan Ibu,			165 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang	

			Bayi dan Anak di Kelompok Kegiatan						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM)
			Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok KB Pria		130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	
			Jumlah Peserta Sosialisasi PIK-KRR		165 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang	
		Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
		Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang dibentuk	Baseline 5 kelurahan	Target 5 kelurahan	Target 5 kelurahan	Target 5 kelurahan	Target 5 kelurahan	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
		Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
		Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Pendampingan Keluarga Balita dan Anak untuk menjadi Orang tua Hebat		50 Pendampingan	50 Pendampingan	75 Pendampingan	100 Pendampingan
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan	Jumlah Pendampingan Remaja untuk menjadikan Generasi Berencana		50 Pendampingan	50 Pendampingan	75 Pendampingan	100 Pendampingan
			Jumlah Peserta Orientasi Bina Keluarga Remaja		-	-	-	-

**DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK,
KELUARGA
BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(DPPKBPM)**

		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
		Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
		Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dalam pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32	32	32	32	32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
		Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

<p>50 Paket</p>	
<p>5000 Orang</p>	<p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>

5000
 5000
 5000
 5000

		Kabupaten/ Kota							
		Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kab/Kota	Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA/TPPO	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah							
									DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Kabupaten/ Kota							
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan bagi perempuan Korban Kekerasan dan/atau TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/T	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	6 layanan bagi perempuan korban kekerasan dan/TPPO	
		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
		Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Persentase tenaga yang terlatih dan kompeten dalam perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	
									DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kab/Kota dst.	Jumlah paket kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan dalam upaya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
		Kegiatan : Penguatan dan							

		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	2	2	2	2	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota							

		<p>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak untuk melindungi pemuda dari ancaman putus sekolah dan rendahnya pendapatan di kemudian hari dan untuk mencegah stunting agar kualitas hidup pemuda dapat menjadi optimal</p>	80 Orang	150 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
		<p>Kegiatan : Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p>							

		Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender dan anak yang dicetak	40 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	Jumlah buku terpilah anak yang dicetak	20 eksemplar	68 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	
		Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku terpilah gender yang tersedia	20 eksemplar	68 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA